

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia (Rahmawati & Westi, 2016).

Kepulauan Indonesia membentang di perairan tropis antara Samudera Hindia dan Pasifik, dan dari Asia Tenggara hingga Australia Utara. Hal ini tidak mengherankan jika Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Kepulauan Indonesia memiliki luas tanah pulau – pulau sekitar 1, 92 juta Km², wilayah laut pedalaman dan laut teritorial 12 juta Km², dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil seluas 2, 7 juta Km². Indonesia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 81.000 Km sehingga merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia (Omar Moeis et al., 2020).

Dengan demikian, Indonesia juga berpotensi besar dalam industri maritim global dimana mencakup berbagai kegiatan ekonomi berbasis laut, termasuk industri galangan kapal, pengadaan suku cadang, perawatan kapal, pelayaran, logistik, terminal peti kemas, serta wisata bahari. Industri maritim global memegang peranan sebagai kunci sistem logistik internasional yang menghubungkan berbagai pusat ekonomi diseluruh dunia. Keberlangsungan rantai pasok global sangat bergantung pada efisiensi moda transportasi laut yang mampu memobilisasi komoditas dalam volume besar secara berkelanjutan.

Dalam era globalisasi, setiap negara dituntut untuk memiliki kedaulatan maritim yang kuat serta armada kapal yang andal guna menjaga stabilitas arus

barang nasional. Ketidaksinkronan dalam mengelola sektor transportasi laut akan berakibat pada pembengkakan biaya logistik yang menurunkan daya saing produk di pasar global. Oleh karena itu, modernisasi manajemen armada menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan pelayaran untuk tetap kompetitif dalam menghadapi fluktuasi pasar. Keunggulan operasional melalui sistem yang terintegrasi merupakan syarat mutlak bagi perusahaan untuk mempertahankan eksistensi bisnis di tengah dinamika industri (Faturrahman, 2021).

Keandalan armada yang telah disebutkan sebelumnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya integrasi yang kuat antara infrastruktur kapal dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam ekosistem maritim yang luas, kapal dipandang sebagai aset fisik yang hanya akan berfungsi secara optimal apabila dikendalikan oleh personel yang memiliki kualifikasi standar internasional. Kesenambungan antara teknologi perkapalan yang terus berkembang dengan kesiapan mental serta fisik para pelaut menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas layanan transportasi laut.

Tanpa manajemen SDM yang tertata, efisiensi logistik tereduksi oleh risiko – risiko operasional yang muncul di lapangan. Oleh sebab itu, setiap bisnis pelayaran harus memandang faktor manusia sebagai elemen penggerak yang setara pentingnya dengan kelayakan teknis kapal itu sendiri. Sinergi antara keandalan sarana dan kompetensi manusia merupakan fondasi utama dalam menciptakan layanan pelayaran yang aman, efektif, dan berkelanjutan (Purnomo & Surabaya, 2020).

Secara umum, pengelolaan kru kapal melibatkan koordinasi yang kompleks antara pemenuhan regulasi keselamatan, kualifikasi profesional, dan kesiapan operasional di atas dek. Manajemen pengawakan yang baik berfungsi untuk menyelaraskan kebutuhan teknis kapal dengan ketersediaan personel yang kompeten agar tercipta produktivitas yang stabil. Tanpa sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terstandarisasi, risiko terjadinya hambatan kerja dan penurunan performa layanan jasa maritim akan semakin besar.

Standar minimum bagi pelaut telah diatur secara komprehensif melalui konvensi internasional *Standards of Training, Certification, and Watchkeeping*

(STCW) sebagai pedoman kompetensi global. Regulasi ini mewajibkan setiap awak kapal memiliki sertifikasi keahlian yang valid sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas navigasi maupun permesinan. Kepatuhan terhadap aturan pengawakan minimum atau *Safe Manning* merupakan syarat legalitas primer agar sebuah kapal mendapatkan izin olah gerak dari otoritas terkait.

Kegagalan dalam memenuhi persyaratan dokumen pengawakan berisiko memicu penahanan kapal oleh *Port State Control* yang berakibat pada terganggunya jadwal operasional. Monitoring masa berlaku sertifikat pelaut secara berkala menjadi tanggung jawab mutlak manajemen guna menghindari kendala administratif yang merugikan. Penegakan hukum maritim yang ketat menuntut setiap perusahaan pelayaran untuk memiliki sistem administrasi kru yang transparan dan akuntabel (Nawawi et al., 2021).

Perusahaan pelayaran sebagai operator armada memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan seluruh regulasi tersebut ke dalam sebuah sistem kerja yang sistematis dan terukur. Fungsi utama manajemen dalam lingkup ini adalah memastikan bahwa setiap unit kapal yang beroperasi didukung oleh ketersediaan tenaga ahli yang siap sedia menghadapi berbagai pelayaran. Keberhasilan operasional sebuah organisasi maritim sangat bergantung pada bagaimana mekanisme rekrutmen dan penempatan personel dikelola secara profesional sesuai dengan spesifikasi kapal.

Kebijakan internal perusahaan harus mampu menjembatani antara tuntutan bisnis yang cepat dengan kewajiban pemenuhan kelaiklautan yang tidak boleh diabaikan. Kepercayaan dari pengguna jasa atau pemilik muatan hanya dapat dipertahankan jika operator kapal menunjukkan konsistensi dalam performa awak kapal yang disiplin. Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang komprehensif merupakan prasyarat bagi setiap perusahaan pelayaran untuk mencapai target kinerja tanpa insiden (Saputra & Utami, 2020).

Mekanisme pengurusan pengawakan mencakup prosedur administrasi yang kompleks, termasuk legalitas Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang melindungi hak dan kewajiban antara pelaut dan perusahaan. Setiap proses mutasi atau pergantian kru memerlukan koordinasi yang intensif antara pihak kantor pusat, agen di pelabuhan,

dan otoritas maritim setempat. Keterlambatan dalam proses pengurusan dokumen *sign – on* maupun *sign – off* dapat mengganggu stabilitas jadwal kapal yang berdampak pada produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terus berupaya mengoptimalkan alur birokrasi internal agar pengurusan dokumen dapat berjalan lebih cepat tanpa mengurangi aspek ketelitian. Penggunaan sistem database terintegrasi menjadi solusi efektif dalam memantau rekam jejak medik dan masa berlaku sertifikat setiap personel. Efektivitas koordinasi lintas departemen menjadi penentu keberhasilan manajemen pengawakan dalam mendukung ritme operasional yang padat (Ramadhan, 2022).

Tantangan dalam pengurusan pengawakan tidaklah sedikit, terutama terkait dengan dinamika kebijakan birokrasi serta ketersediaan kru pengganti yang memiliki kualifikasi spesifik. Ketangguhan perusahaan dalam menghadapi hambatan administratif, seperti proses mobilisasi personel di wilayah terpencil, akan menentukan sejauh mana kelancaran operasional armada dapat dipertahankan secara konsisten. Inovasi dalam sistem manajemen kru menjadi kunci untuk mengatasi kompleksitas pengawakan yang sering kali menjadi kendala bagi operator kapal di Indonesia (Alif Kusdarmawan, 2022).

Pada pelaksanaannya di lapangan, PT Samudera Sarana Karunia sering kali menghadapi kendala nyata berupa permasalahan administratif dalam pemrosesan dokumen pelaut yang tidak sinkron dengan jadwal keberangkatan kapal. Ketidakteraturan jadwal rotasi awak kapal menjadi permasalahan yang sering mengganggu stabilitas operasi armada, di mana proses penandatanganan dokumen *sign-on* dan *sign-off* kerap mengalami keterlambatan. Hambatan koordinasi antara pihak kantor pusat, agen di pelabuhan, dan otoritas maritim setempat menyebabkan terjadinya penumpukan dokumen administrasi yang berpotensi menghambat efisiensi operasional perusahaan secara menyeluruh.

Menanggapi fenomena tersebut, PT Samudera Sarana Karunia dituntut untuk memiliki mekanisme pengurusan pengawakan yang lebih adaptif guna meminimalkan risiko keterlambatan operasional yang disebabkan oleh masalah administratif. Sinkronisasi antara kebutuhan personel yang mendesak dengan prosedur hukum yang berlaku di PT Samudera Sarana Karunia memerlukan

pendekatan manajemen yang taktis dan berkelanjutan. Strategi pengawakan yang dijalankan oleh perusahaan ini pada akhirnya akan menjadi faktor penentu dalam menjaga keandalan armadanya di perairan nasional.

Pengkajian terhadap kendala administratif dan teknis dalam manajemen kru pada perusahaan tersebut akan memberikan gambaran komprehensif bagi manajemen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Fokus pada optimalisasi Sumber Daya Manusia ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan performa operasional armada secara menyeluruh di PT Samudera Sarana Karunia. Dengan sistem pengawakan yang lebih sistematis, perusahaan dapat meminimalisir risiko keterlambatan serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar kelaiklautan yang berlaku. Hasil kajian ini nantinya diharapkan menjadi referensi strategis bagi PT Samudera Sarana Karunia dalam mengambil kebijakan pengawakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Keberhasilan dalam manajemen pengawakan adalah cerminan dari kematangan operasional sebuah perusahaan pelayaran yang profesional.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, terlihat adanya permasalahan krusial terkait hambatan administratif dalam pengurusan dokumen pelaut dan ketidakteraturan jadwal rotasi kru yang sering kali memicu pada armada perusahaan. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Mekanisme Pengurusan Pengawakan dalam Mendukung Kelancaran Operasional di PT Samudera Sarana Karunia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:.

- 1 Bagaimana mekanisme pengurusan pengawakan dalam menjamin kelaiklautan sesuai regulasi?
- 2 Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pengurusan dokumen administrasi dan sign on / sign off crew?
- 3 Bagaimana upaya optimalisasi manajemen pengawakan dalam mewujudkan kelancaran operasional armada yang efektif?

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan keterbatasan pengetahuan penulis yang dapat dari studi pustaka dan pengetahuan yang diperoleh di lapangan, maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang teori – teori dan pelaksanaan tentang analisis kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan pengurusan pengawakan kapal di PT Samudera Sarana Karunia.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam mekanisme pengurusan pengawakan agar sesuai dengan regulasi maritim yang berlaku.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering muncul dalam proses administrasi dokumen pelaut dan manajemen pergantian awak kapal
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi manajemen pengawakan dalam mewujudkan kelancaran operasional armada yang efektif.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulis ingin capaikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan untuk evaluasi dan kebijakan dimasa yang akan datang mengenai peranan keagenan kapal dalam proses kelancaran kegiatan operasional pelayaran pelayaran dan menjadi bahan peningkatan di instansi.

2. Bagi Civitas Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman

Penulisan ini menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta terampil dan memiliki daya saing di dunia kerja sebagai generasi terbarukan dan inovatif

3. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta mampu mempraktekkan semua teori-teori dan menjadi pemecah permasalahan yang dapat berguna bagi semua orang.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunannya sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (*ENGLISH*)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Perumusan Masalah

1.3 Pembatasan Masalah

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Pemecahan Masalah

4.4 Evaluasi Pemecahan Masalah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA